



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **MULYADI BIN ASMAWI**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 November 1983, NIK 3511012212830001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT. 13 RW. 02 Desa Tanahwulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

HANIF BINTI SAMSURI, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 17 Maret 1989, NIK 3511014104900002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan II RT. 13 RW. 02 Desa Tanahwulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 18 Juli 2006 (17 tahun 5 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani dengan penghasilan sebesar

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, alamat di Dusun Krajan II RT. 13 RW. 02 Desa Tanahwulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa dalam waktu secepatnya para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI tersebut dengan calon istrinya bernama NAISILAH BINTI JUMAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Januari 2005 (19 tahun), Agama Islam, alamat di Dusun Arjasa RT. 01 RW. 01 Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI dengan calon istrinya telah bertunangan selama 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama NAISILAH BINTI JUMAT;
5. Bahwa antara anak kandung bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;
7. Bahwa antara anak kandung bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejaka);
8. Bahwa para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Maesan

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI untuk menikah dengan MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon istrinya dipersidangan sebagai berikut :

- ❖ **Anak kandung Pemohon : MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, ia adalah anak Pemohon yang bernama NAISILAH BINTI JUMAT, umur 19 tahun;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon istrinya bernama NAISILAH BINTI JUMAT, umur 19 tahun dan merasa tertarik saling mencintai selama 3 bulan;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga serta Ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;
- ❖ **Calon ISTRI anak Pemohon : NAISILAH BINTI JUMAT** , dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa, ia adalah calon istri anak Pemohon bernama NAISILAH BINTI JUMAT, umur 19 tahun ;
 - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI , sejak 3 bulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suami tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (MULYADI BIN ASMAWI) NIK : 3511012212830001; tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (HANIF BINTI SAMSURI) NIK : 3511014104900002 tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. MULYADI BIN ASMAWI Nomor : 3511011107080005 tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI Nomor 3511-LT-01112016-0258 tanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI Nomor DN-05/D-SMP/K-13/0089681 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP ISLAM MAHFILUD DUROR Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAISILAH BINTI JUMAT (calon istri anak Para Pemohon) nomor 3511014101050020 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 460/3380/430.9.7/2023 tanggal 28 November 2023, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI dan NAISILAH BINTI JUMAT nomor : 440/6663/430.9.3/2023 tanggal 26 November 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Nomor B-778/Kua.13.06.05/Pw.01/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HUSIN BIN MUSTAFA, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mudin, bertempat tinggal di RT. 11 RW. 04 Desa Kajar Kecamatan Tenggarrang Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung Pemohon bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI umur 17 tahun 5 bulan yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAISILAH BINTI JUMAT , umur 19 tahun ;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI sudah 3 bulan menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama NAISILAH BINTI JUMAT dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI ke Pejabat Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon (MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI) dan calon istrinya (NAISILAH BINTI JUMAT) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon istrinya adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai Petani tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

2. TAYIB BIN JUMADIN, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 12 RW. 02 Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak kandung mereka bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI umur 17 tahun 5 bulan yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAISILAH BINTI JUMAT , umur 19 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI sudah 3 bulan menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama NAISILAH BINTI JUMAT dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI dan calon istrinya (NAISILAH BINTI JUMAT) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon istrinya adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang masih dibawah umur namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NAISILAH BINTI JUMAT meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1 dan P-2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), Para Pemohon dan MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI terhimpun dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari MUHAMMAD HIDAYATUL

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULA BIN MULYADI maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI sebagai anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SMP, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-4, P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-6) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-6) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-6) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-7, P-8) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-9) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung para Pemohon bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI umur 17 tahun 5 bulan dan akan menikah dengan calon istrinya bernama NAISILAH BINTI JUMAT umur 19 tahun ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 3 bulan;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan para Pemohon dengan orang tua calon istri anak para Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen membantu perekonomian anaknya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 3 bulan dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung para Pemohon, dan dari keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon istri dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HIDAYATUL MAULA BIN MULYADI untuk menikah dengan NAISILAH BINTI JUMAT;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai hakim pada

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bondowoso, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Hakim
ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	400.000,00
4	PNBP	:	Rp	20.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:
Diberikan kepada MULYADI BIN ASMAWI, atas permintaan MULYADI BIN ASMAWI pada tanggal 12 Januari 2024.

Note Here:
Given to MULYADI BIN ASMAWI, by the request of MULYADI BIN ASMAWI on January 12, 2024.

Bondowoso, 12 Januari 2024
Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama
Bondowoso

Sugeng Hariyadi, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No. 17/Pdt.P/2024/PA.Bdw